

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DUSUN DALAM MERENOVASI MASJID BERSEJARAH

Syah Amin Albadry,

albadry1489@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio

ABSTRAK

Salah satu tuntutan terhadap Analisis Kebijakan Pemerintah Dusun Dalam Merenovasi Masjid Bersejarah Al-Falah Dusun Empelu adalah bentuk masjid yang berubah total dari sebelumnya. Ini berarti pemerintah dusun memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembangunan masjid, termasuk penyediaan sarana dan prasarana masjid.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah dusun dalam merenovasi masjid bersejarah Al-Falah Dusun Empelu juga hambatan serta upaya pemerintah dusun dalam merenovasi masjid bersejarah Al-Falah Dusun Empelu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dusun dalam merenovasi masjid bersejarah Al-Falah Dusun Empelu. Populasi penelitian adalah populasi yaitu Rio Dusun Empelu dan perangkat dusun, tokoh agama/pegawai syara' dan beberapa masyarakat yang ada di Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo. Sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan, dimana yang dijadikan sampel adalah pihak-pihak yang berkompeten dengan objek penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah dusun dalam merenovasi masjid bersejarah belum maksimal, hal ini dikarenakan oleh berbagai hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya anggaran (biaya) dalam merenovasi masjid bersejarah menyebabkan pembangunan masjid jadi terbengkalai; dan perbedaan pendapat antara pemerintah dusun dengan masyarakat tentang konsep bangunan, hal ini mengakibatkan masjid berubah total dari sebelumnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dusun dan masyarakat dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi ialah menetapkan iuran bagi masyarakat dusun untuk melanjutkan pembangunan renovasi masjid; dan menyatukan pendapat antara pemerintah dusun dengan masyarakat dalam merenovasi masjid bersejarah, agar terwujudnya masjid yang kita inginkan selama ini.

Kata kunci: Analisis, kebijakan, masjid bersejarah

ANALYSIS OF THE GOVERNMENT POLICY IN THE INSIDE RECOVERING HISTORICAL MOSQUE

Syah Amin Albadry,

albadry1489@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio

ABSTRACT

One of the demands of the Hamlet Government Policy Analysis in Renovating the Al-Falah Historical Mosque in the Empelu Hamlet was a mosque that changed completely from before. This means the hamlet government has a big responsibility in the construction of mosques, including the provision of mosque facilities and infrastructure.

The purpose of this research was to find out the village government policy in renovating the historic Al-Falah mosque in Empelu Hamlet as well as the obstacles and efforts of the hamlet government in renovating the historic Al-Falah mosque in Empelu Hamlet. The research method used is descriptive method with a qualitative approach that aims to determine the policy of the village government in renovating the historic Al-Falah mosque in Empelu Hamlet. The population of the research was population, namely Rio Hamlet Empelu and hamlet devices, religious leaders / employees of the Shara 'and some communities in Empelu Hamlet, Tanah Sepenggal District, Bungo Regency. The research sample used purposive sampling technique or purposive sampling, in which the samples were those who were competent with the object of research.

The results of the research and discussion illustrate that the policy of the village government in renovating historic mosques has not been maximized, this is due to the various obstacles faced, including the lack of budget (cost) in renovating the historic mosque causing the construction of the mosque to be abandoned; and differences of opinion between the hamlet government and the community about the concept of building, this resulted in the mosque changing completely from before. The efforts made by the hamlet and community governments in overcoming the obstacles faced were to set contributions for the hamlet community to continue the construction of mosque renovations; and bringing together opinions between the hamlet government and the community in renovating the historic mosque, so that the mosque that we want so far.

Keywords: Analysis, policy, historic mosque

PENDAHULUAN

Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat sosial dan juga pusat pengembangan kebudayaan Islam. Selain berfungsi sebagai tempat beribadah, masjid berguna juga bagi aktivitas syiar Islam yang bertujuan memajukan umat Islam dalam segala aspek kehidupan baik sosial budaya maupun politik.

Masuknya Islam dan perkembangannya di Indonesia telah memberikan pengaruh pada alam pikiran kehidupan masyarakatnya. Pengaruh tersebut senantiasa tidak hanya terbatas pada bidang mental spiritual saja, tetapi juga dalam wujud pola pikir serta kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu bentuk pengaruh itu ditandai dengan munculnya seni bangunan Islam berupa bangunan masjid.

Bangunan masjid merupakan salah satu wujud penampilan budaya Islam. Masjid muncul sebagai pusat kegiatan Islam yang merupakan perpaduan dari fungsi bangunan sebagai unsur arsitektur Islam yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai tempat pelaksanaan ajaran Islam, dengan bangunan sebagai ungkapan tertinggi dari nilai-nilai luhur suatu kehidupan manusia yang juga melaksanakan ajaran Islam. Maka tampillah arsitektur masjid dengan segala kelengkapannya, dengan bentuk, gaya, corak, dan penampilannya dari setiap kurun waktu, setiap daerah, lingkungan kehidupan dengan adat dan kebiasaan, serta latar belakang manusia yang menciptakannya.

Bentuk bangunan masjid di Indonesia dari bentuk semula yang sederhana berupa musholla, langgar atau surau kemudian mengalami perkembangan bentuk yang

lebih sempurna. Perkembangan Islam di Indonesia banyak mewariskan peninggalan bersejarah antara lain masjid-masjid lama. Masjid-masjid lama yang ada di Indonesia bermacam-macam bentuknya sesuai kebudayaan yang mempengaruhinya.

Sebagai contohnya, yaitu Masjid Al-Falah yang terletak di Dusun Empelu, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Masjid tua dengan bangunan bergaya melayu itu dibangun pada tahun 1812. Pengerjaan masjid tersebut dilakukan secara bertahap. Pendirian awal Masjid Al-Falah dikerjakan oleh Rio (sebutan untuk kepala desa/dusun) Agung bersama masyarakat, atas perintah Pangeran Anom. Saat didirikan, bentuk bangunan masjid tersebut masih berbentuk rumah panggung yang terdiri dari beberapa tiang, beratap daun rumbia, dengan dinding dari kayu, dan lantai dari bilah, yang pada masa itu disebut sebagai surau Al-Falah.³

Pada tahun 1827, bangunan surau Al-Falah direhab menjadi bangunan berbatu dengan tembok dari semen dan diubahlah menjadi Masjid Al-Falah. Pada tahun 1837, bangunan masjid kembali direhab. Saat itu, bangunan mulai tampak indah, dengan keindahan seni arsitektur serta interior yang cukup menarik. Selain itu, terkandung pula simbol-simbol atau makna-makna yang cukup luas dari bentuk fisik bangunan.⁴

Perkembangan tahun demi tahun membuat bangunan ini semakin tua. Seiring dengan hal tersebut dan penggantian rio, maka timbullah keinginan untuk merenovasi Masjid Al-Falah.

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Rifa'i Sebagai Tokoh Agama dan Mantan Pengurus Masjid Al-Falah Dusun Empelu Tahun 2010, Tanggal 04 April 2016

⁴ *Ibid*,

Renovasi tersebut berdasarkan musyawarah dusun dan dilakukan pada tahun 2014. Di dalam pembangunan renovasi tersebut, maka terbentuklah suatu kepanitiaan, yaitu panitia renovasi masjid.

Di dalam rancangan renovasi itu, ada 2 konsep bangunan yang mengajukan untuk direnovasi yaitu :⁵

1. Konsep dari H. Arfan yang merupakan salah satu donatur untuk Dusun Empelu dan anak dari H. Hasan Bin H. Tahir (Mantan Bupati Bungo Tebo)
2. Konsep dari kepanitiaan yang merupakan masyarakat Dusun Empelu

Berdasarkan konsep dari H. Arfan, struktur dan bentuk masjid tidak berubah tetapi dengan biaya yang cukup tinggi, sehingga kemampuan masyarakat untuk biaya tersebut tidak mencapai. Sedangkan dari kepanitiaan, dibuatlah konsep sendiri dengan biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah, yaitu :Bagaimana kebijakan pemerintah dusun dalam merenovasi masjid bersejarah Al-Falah Dusun Empelu?

LANDASAN TEORI

Kebijakan pada umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun, kebijakan bukanlah sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. Rose mengartikan kebijakan lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya

sekedar suatu keputusan. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Friedrich yang memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud. Anderson mengartikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian.⁶

Ciri-Ciri Kebijakan

Ciri-ciri penting dari suatu kebijakan adalah:⁷

1. Saling ketergantungan, suatu masalah kebijakan mempunyai keterkaitan dengan masalah kebijakan dibidang lainnya
2. Subyektivitas, artinya masalah kebijakan timbul dalam suatu lingkungan tertentu yang berupa situasi masalah
3. Sifat buatan dari masalah, artinya masalah kebijakan merupakan produk dari penilaian subyektif manusia, dari defenisi yang sah dari kondisi sosial yang obyektif, dan karenanya harus diubah secara sosial melalui policy (kebijakan)
4. Dinamika, artinya masalah kebijakan senantiasa berubah, sejalan dengan perubahan sosial dan kondisi. Masalah kebijakan tidak bersifat konstan

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ilyas Sebagai Ketua Panitia Renovasi Masjid Al-Falah Dusun Empelu, Tanggal 05 Mei 2016

⁶ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, Hal. 36

⁷ *Ibid*, Hal. 8

Unsur-Unsur Kebijakan

Secara konseptual, kebijakan publik adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. konsep ini memperlihatkan adanya kandungan empat unsur pokok yaitu:⁸

- a. Unsur usaha dalam kebijakan adalah dimaksudkan bahwa kebijakan itu terjadi sebagai usaha yang dilakukan, usaha mana bisa dalam bentuk tindakan (kelakuan atau perilaku atau perbuatan) dan bisa dalam bentuk pemikiran seperti pendapat atau gagasan.
- b. Unsur tujuan sangatlah penting sebab dengan menegaskan kehendak yang dinyatakan atas dasar pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah membedakannya dengan tujuan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku non pemerintah. Pemerintah dapat berbuat karena kekuasaan yang dimilikinya dan kekuasaan itu berada dalam wilayah yang disebut kedaulatan suatu daerah atau negara.
- c. Unsur sarana. Begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan antara lain, tentang besar atau luasnya sarana dibanding dengan tujuan yang dicapai. Jika sarana lebih besar ketimbang tujuan, hal itu memerlukan pertimbangan rasional.
- d. Unsur waktu adalah dimaksudkan sebagai suatu keadaan yang berkenaan dengan jangka waktu pencapaian tujuan, penggunaan sarana dan kegiatan atau upaya yang dilakukan.

⁸ Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 15-18

Waktu dalam isi kebijakan selalu berkaitan dengan tiga unsur lainnya dan selalu terkait dengan kecepatan terlaksananya kegiatan dan tercapainya tujuan.

Model-Model Kebijakan Pemerintah

Ada beberapa model kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut :⁹

1. Model Elit
Yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.
2. Model Kelompok
Berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka pada model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.
3. Model Kelembagaan
Yang dimaksud dengan kelembagaan di sini adalah kelembagaan pemerintah.
4. Model Proses
Model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.
5. Model Rasialisme
Dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat, untuk meningkatkan hasilnya untuk mencapai tujuan secara efisien.
6. Model Inkrementalisasi
Model ini berpatokan pada kegiatan masa lalu dengan sedikit perubahan. Dengan demikian hambatan seperti

⁹ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hal. 146-148

waktu, biaya dan tenaga untuk memilih alternatif dapat dihilangkan.

7. Model Sistem

Model ini beranjak dari memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi kebijakan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi dengan 7 orang informan yang terdiri dari 1 orang key informance dan 6 orang ordinary informance. Adapun tahap prosedur dalam analisis data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian
- b. Melakukan pemeriksaan data yang didapat apakah sesuai dengan diharapkan
- c. Pengelompokkan data-data guna menjawab pertanyaan penelitian
- d. Melaksanakan pembahasan dan perumusan terhadap data yang didapatkan
- e. Mengambil kesimpulan akhir terhadap data yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pada umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun, kebijakan bukanlah sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. Namun kebijakan yang ditetapkan tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan tersebut dapat berupa tenaga, pikiran maupun materi demi tercapainya suatu keinginan yang telah ditetapkan. Begitu pula renovasi yang dilakukan terhadap masjid Al-Falah Dusun Empelu, yang masih sangat membutuhkan dana yang cukup untuk pembangunan masjid tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Marzuki selaku Rio di Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal mengatakan bahwa, "Pelaksanaan renovasi masjid telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun dalam perjalanan pembangunannya terhambat karena kurangnya dana sumbangan baik dari pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun partisipasi dari masyarakat dusun itu sendiri."¹⁰

Kemudian ia menambahkan bahwa, "Melihat kondisi bangunan yang terbengkalai, maka kami (aparatur pemerintahan dusun) bersama pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil kebijakan dalam hal ini yaitu menetapkan iuran bagi setiap masyarakat dusun yang telah ditentukan setiap tingkatan-tingkatannya."¹¹

Ilyas selaku ketua panitia renovasi Masjid Al-Falah membenarkan apa yang dikatakan oleh Marzuki, dan ia

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Datuk Rio (Marzuki) Dusun Empelu, Tanggal 03 Mei 2016

¹¹ *Ibid*,

menambahkan bahwa, “Kebijakan itu diambil karena melihat dana dari kas dusun tidak mencukupi untuk pembangunan masjid, sehingga jalan satu-satunya agar pembangunan tetap berjalan ialah dengan menetapkan iuran bagi masyarakat dusun.”¹²

Ditambah lagi oleh Sekretaris Panitia Renovasi Masjid Al-Falah, bahwa “Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan renovasi masjid maka dari iuran itulah nantinya dapat melihat sejauh mana masyarakat dusun peduli terhadap tempat peribadatan.”¹³

Jadi, berdasarkan hasil analisis saya, kebijakan perlu dijalankan untuk meningkatkan proses pembangunan secara bertahap. Dukungan masyarakat itu sangat dibutuhkan demi kelancaran pembangunan tersebut. Untuk pemerintah dusun, di sinilah perannya dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kelancaran pembangunan yang ada di suatu tempat.

Keberhasilan pencapaian tujuan untuk merenovasi masjid melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari dukungan semua pihak seperti perangkat dusun, tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat dusun itu sendiri. Meskipun telah melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, namun pada kenyataannya masih adanya berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan

tersebut. Hambatan-hambatan itu antara lain:

Kurangnya Anggaran (Biaya) dalam Renovasi Masjid Al-Falah

Pendanaan berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Hasil pemanfaatan cagar budaya; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, menurut UU No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Oleh karena itu, Masjid Al-Falah Dusun Empelu juga termasuk cagar budaya yang ada di Kabupaten Bungo dalam hal bangunannya. Sebab berdasarkan sejarah masjid tersebut merupakan masjid yang tertua di Kabupaten Bungo.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan cagar budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Pendanaan pelestarian cagar budaya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Hal ini diakui oleh Datuk Rio Dusun Empelu bahwa : “Sampai saat ini, belum

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Ilyas Sebagai Ketua Panitia Renovasi Masjid Al-Falah Dusun Empelu, Tanggal 05 Mei 2016

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Defriwan Sebagai Sekretaris Panitia Renovasi Masjid Al-Falah Dusun Empelu, Tanggal 06 Mei 2016

ada bantuan dari instansi yang terkait dengan cagar budaya untuk renovasi Masjid Al-Falah Dusun Empelu. Yang kami tahu Kantor Departemen Agama (Kadepag) Kabupaten Bungo selaku departemen keagamaan belum juga merealisasikan dana tentang renovasi tersebut. Apalagi Masjid Al-Falah termasuk masjid tertua yang ada di Kabupaten Bungo dan telah dijadikan sebagai cagar budaya.”¹⁴

Semua fasilitas masjid yang sudah ada harus dikelola dengan baik dan tepat penggunaannya, karena hal itu merupakan bagian dari amanat umat. Di samping itu, semua fasilitas yang ada hendaknya dikembangkan sedemikian rupa. Artinya seluruh fasilitas yang ada tadi harus dirawat atau dipelihara dengan baik dan ditambah atau diperluas dan dilengkapi, sehingga fasilitas tersebut makin hari keberadaannya kian relatif lebih baik, lebih lengkap, lebih bermanfaat, lebih memadai serta lebih bisa memenuhi kebutuhan manajemen jama'ah dan kebutuhan umat Islam pada umumnya.

Memelihara bangunan fisik masjid mencakup berbagai sisi diantaranya :¹⁵

- a. Memelihara keindahan masjid, baik dari sisi artistik atau keindahan dan kenyamanan masjid bagi para jamaah. Juga dengan memperhatikan segala hal yang mengganggu keindahan masjid, baik interior maupun eksterior
- b. Memelihara lingkungan masjid, lingkungan masjid yang dimaksud adalah daerah yang masih dalam

wilayah masjid, seperti halaman depan dan belakang, taman-taman, serta jalan menuju masjid, juga perlu diperhatikan. Sebaiknya daerah di sekitar masjid dibersihkan atau dibebaskan dari keramaian yang mengganggu khusyuknya pelaksanaan ibadah

- c. Memelihara suasana masjid, menciptakan suasana tenang dengan meminimalisir segala gangguan. Juga, menciptakan suasana tertib bagi para jamaah yang hadir di dalam masjid, termasuk tertib shaf (barisan shalat) dan tertib dalam penempatan barang, juga mengatur tempat khusus untuk jamaah perempuan. Kemudian, menjaga keamanan setiap jamaah yang masuk ke dalam masjid
- d. Memelihara ketertiban masjid, dilakukan dengan menegakkan tata tertib yang berlaku di dalam masjid atau etika yang seharusnya diikuti oleh setiap jamaah seperti dilarang berbicara dan mengobrol tanpa memperhatikan batasan syar'i
- e. Memelihara masjid di waktu malam adalah bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan seluruh harta kekayaan masjid dari tindak kriminal dan pelecehan. Sebab, dimungkinkan akan ada orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu mencemarkan masjid dengan tindakan yang tidak terpuji

Terselenggaranya kegiatan yang membuat masjid menjadi makmur amat memerlukan fasilitas fisik masjid yang memadai guna untuk kepentingan peribadatan secara khusus, dan ditambah lagi informasi dari tokoh agama yang juga kami wawancarai bahwa: “Kurangnya fasilitas-fasilitas masjid tersebut disebabkan kurangnya dana dalam melengkapinya, sehingga

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Datuk Rio (Marzuki) Dusun Empelu, Tanggal 03 Mei 2016

¹⁵ Eman Suherman, *Manajemen Masjid Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, Alfabeta, Bandung, 2012, Hal. 113-115

untuk renovasi Masjid Al-Falah pun pada saat ini terhambat dan mengakibatkan fasilitas masjid tidak memadai untuk di rasakan oleh masyarakat dusun seperti kamar mandi/wc dan tempat wudhu.”¹⁶

Daya dukung yang tidak bisa dipisahkan dari upaya memakmurkan masjid adalah dana yang cukup. Tapi yang terjadi sekarang, Masjid Al-Falah justru kekurangan dana. Jangankan untuk mengembangkan aktivitas, untuk menyelesaikan pembangunan dan melengkapi fasilitasnya saja kekurangan dana. Akibatnya, begitu banyak dana yang harus dicari agar pembangunan masjid tersebut berjalan dengan lancar.

Perbedaan Pendapat Antara Pemerintah Dusun Dengan Masyarakat Tentang Konsep Bangunan

Konsep bangunan adalah rancangan global sebelum didirikannya suatu bangunan. Hal ini sangat penting dibuat agar pembangunan yang direncanakan tidak melenceng dari perencanaan. Dalam membangun masjid harus berbeda dengan membangun sebuah rumah, karena masjid merupakan tempat ibadah, maka nuansa spiritual yang mewarnai bangunan masjid tersebut harus diperhatikan. Serta pelaksanaan ibadah dan aktivitas lain yang menjadi ciri khas dan karakter masjid pun juga harus diperhatikan.

Nasrun selaku masyarakat Dusun Empelu mengungkapkan bahwa, “Sangat disayangkan dengan adanya perubahan pada renovasi masjid yang bersejarah ini.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rifa'i sebagai Tokoh Agama Dusun Empelu, Tanggal 04 Mei 2016

Bentuk masjid berbeda dari yang dulu seperti yang terlihat pada saat ini.”¹⁷

Ditambah lagi oleh Arifin Saleh, bahwa “Perubahan renovasi pada masjid sekarang terlihat pada bentuk bangunannya yang menghilangkan sebagian dari nilai sejarah yang ada. Padahal masjid tersebut merupakan masjid bersejarah yang ternama di Kabupaten Bungo yang dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat Dusun Empelu.”¹⁸

Dalam setiap pembangunan pasti ada hambatan-hambatannya seperti anggaran (biaya). Untuk pemerintah dusun dan panitia pembangunan, bentuk masjid kedepannya harus punya rancangan (konsep) pembangunan masjid dan pengerjaannya secara bertahap, agar masyarakat memahami arti pembangunan masjid yang jelas. Apalagi ini adalah pembangunan masjid yang akan menjadi kebanggaan bagi pemerintah dusun dan masyarakat Dusun Empelu.

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah dusun dalam merenovasi Masjid Al-Falah Dusun Empelu, antara lain yaitu :

Menetapkan Iuran Bagi Masyarakat Dusun untuk Melanjutkan Pembangunan Renovasi Masjid

Dalam upaya menggerakkan program pembangunan, dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam penyelenggaraan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Nasrun, Masyarakat Dusun Empelu, Tanggal 08 Mei 2016

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Arifin Saleh, Masyarakat Dusun Empelu, Tanggal 08 Mei 2016

pembangunan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan tanpa didorong oleh dana yang memadai prosesnya akan pincang dan hal ini merupakan fenomena umum yang dialami setiap daerah tak terkecuali Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal. Untuk mengantisipasi fenomena tersebut, berbagai upaya dilakukan termasuk di dalamnya kemampuan pemerintah dusun dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menghimpun dana yang cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan.

Setiap masjid hendaknya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM) agar semua rencana kerja dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sumber-sumber dana masjid diantaranya :¹⁹

Zakat, infaq, dan sedekah masyarakat

Wakaf

Donatur

Marzuki selaku Rio Dusun Empelu mengatakan bahwa: “Salah satu upaya yang kami lakukan untuk melanjutkan pembangunan Masjid Al-Falah yaitu dengan iuran dari masyarakat. Namun, iuran tersebut dikurangi dari sebelumnya mengingat ekonomi masyarakat dusun yang menurun.”²⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh Defriwan bahwa: “Mengingat sumber-sumber dana untuk pembangunan masjid yang masih kurang dari infaq, shadaqah, dan lain sebagainya, maka untuk penambahannya dilakukan iuran terhadap

masyarakat dusun, namun tidak memberatkan masyarakat.”²¹

Upaya untuk membangun dan memakmurkan masjid harus disertai dengan orang-orang yang memakmurkannya, berbagai macam usaha berikut ini bila benar-benar dilaksanakan, dapat diharapkan memakmurkan masjid secara material dan spiritual. Namun, semuanya itu tetap tergantung pada kesadaran dari pribadi masing-masing. Seperti dalam suatu organisasi pemerintahan, baik pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan pemerintahan dusun, hendaklah masyarakat bekerja sama dalam suatu kegiatan seperti pada renovasi masjid yang merupakan tanggung jawab bersama.

Seperti yang dijelaskan oleh Arifin, bahwa : “Sebaiknya para pemerintah dusun lebih mengayomi masyarakat karena suara tertinggi itu ditangan masyarakat. Jadi, apapun yg dilakukan tentang perubahan dusun termasuk masjid, sebaiknya harus ada musyawarah dengan masyarakat, agar apa yang dilakukan nantinya berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama.”²²

Defriwan selaku Sekretaris Panitia Renovasi menambahkan bahwa “Yang kami inginkan adalah terwujudnya masjid yang lebih bagus bangunannya, namun semua itu tidak begitu didukung oleh sebagian masyarakat, sehingga pada saat dilakukan renovasi terjadilah perbedaan pendapat antara pemerintah dusun dengan

¹⁹ Zaini Dahlan, *Manajemen Masjid Dalam Pembangunan Masyarakat Optimalisasi Peran dan Fungsi Masjid*, Yogyakarta, UII Press, 2001, Hal. 52-59

²⁰ Hasil Wawancara dengan Datuk Rio (Marzuki) Dusun Empelu, Tanggal 03 Mei 2016

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Defriwan Sebagai Sekretaris Panitia Renovasi Masjid Al-Falah Dusun Empelu, Tanggal 06 Mei 2016

²² Hasil Wawancara dengan Bapak M.Sayuti sebagai Tokoh Agama Dusun Empelu, Tanggal 10 Mei 2016

masyarakat tentang konsep pembangun tersebut.”²³

Jadi, untuk kedepannya pemerintah dusun dan masyarakat harus bekerja sama dalam membangun masjid agar masjid tidak terbengkalai lagi pembangunannya dan sama-sama menghadapi permasalahan yang ada.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah dusun dalam merenovasi masjid bersejarah sangat diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang mengumpulkan fakta dari hasil wawancara dengan Datuk Rio dan masyarakat Dusun Empelu bahwa untuk merenovasi masjid harus melibatkan seluruh kepala kampung, masyarakat dusun, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Partisipasi kepala kampung dan lembaga-lembaga terkait tersebut didalam kepanitiaan adalah penagihan iuran dari masyarakat dusun. Hal ini disebabkan kepala kampung sangat mengenal masyarakat di kampungnya masing-masing dan bertujuan agar pembangunan tersebut berjalan dengan lancar.

Hambatan pemerintah dusun dalam merenovasi masjid bersejarah. Pertama : Kurangnya anggaran (biaya) dalam renovasi masjid dikarenakan ekonomi masyarakat yang kurang mendukung. Kedua : Perbedaan pendapat antara pemerintah dusun dengan masyarakat tentang konsep bangunan.

Upaya pemerintah dusun dalam mengatasi hambatan renovasi masjid bersejarah. Pertama : Menetapkan Iuran bagi

masyarakat dan dikurangi dari yang ditetapkan sebelumnya. Kedua: Menyatukan pendapat antara pemerintah dusun dengan masyarakat Dusun Empelu.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, *Bungo Dalam Angka 2015*.
- Bernadus Luankali, *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*, Amelia Press, Surabaya, 2007.
- Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan dan Potensi Masjid*, Ziyad Visi Media, Surakarta, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Eman Suherman, *Manajemen Masjid Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- _____, *Organisasi & Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Profil PKK Kecamatan Tanah Sepenggal Tahun 2015.
- Sondang P Siagian, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Tarsito, Bandung, 1989.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Defriwan Sebagai Sekretaris Panitia Renovasi Masjid Al-Falah Dusun Empelu, Tanggal 06 Mei 2016